

LAPORAN INOVASI LAYANAN  
KOMPILASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN  
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN



Oleh  
GUGUS PENGEMBANGAN INOVASI DAN MUTU KINERJA  
LAYANAN  
TIM KERJA ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN HUKUM

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2023

## LEMBAR PENGESAHAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 14 November tahun dua ribu dua puluh tiga, telah dilaksanakan dan dilaporkan hasil dari Gugus Pengembangan Inovasi dan Mutu Kinerja Layanan Tim Kerja OKH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Judul : Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan  
Dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman

Susunan Tim

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd

Penanggung Jawab : Hj. Umihanik, SE., MM

Ketua : Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI

Anggota : Meutia Balgis, S.IP  
Arif Mahmud, S.Kom  
Aditya Hendrasena, SH., M.H

Unit : Tim Kerja OKH

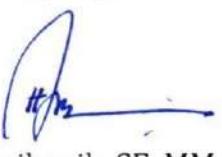
Setelah dilakukan pengecekan dan pembahasan maka laporan inovasi ini disetujui sebagai hasil dari inovasi layanan.

Ketua,



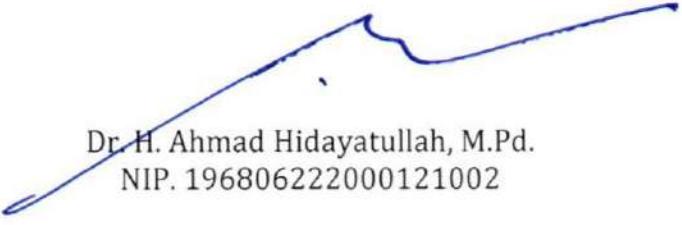
Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI  
NIP. 197809142009121004

Penanggung Jawab,



Hj. Umihanik, SE, MM  
NIP. 197108292005012003

Pembina,



Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd.  
NIP. 196806222000121002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT yang telah memberikan kemudahan atas kehidupan ini serta sholawat salam tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai hari kiamat.

Penulis patut berterimakasih karena dapat menyelesaikan laporan atas amanah yang diberikan kepada kami berdasarkan SK Rektor No. 803 tahun 2023 tentang Gugus Pengembangan Inovasi Dan Mutu Kinerja Layanan Organisasi dan Hukum Tahun Anggaran 2023. Adapun judul inovasi kami adalah: "Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman."

Selesainya dalam menyusun laporan ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan bimbingan semua pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd., selaku Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya terutama para tenaga kependidikan pada khususnya. Akhir kata kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan laporan ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan kami.

Malang,

Ketua Tim,



Abdul Ghofar Ahmad Chan

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Area Layanan Inovasi .....	1
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Kriteria/ Indikator Keberhasilan.....	3
BAB II .....	4
DESKRIPSI LAYANAN INOVASI.....	4
A. Profil Lembaga.....	4
B. Roadmap/ Milestone Layanan Inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman .....	6
C. Stakeholder Layanan Inovasi .....	9
D. Strategi Komunikasi yang Dibangun.....	10
BAB III.....	11
PELAKSANAAN LAYANAN INOVASI .....	11
A. Capaian Layanan Inovasi .....	11
B. Kendala Internal dan Eksternal.....	14
C. Strategi Mengatasi Masalah.....	14
BAB IV.....	16
PENUTUP .....	16
A. Kesimpulan.....	16
B. Rekomendasi .....	16
C. Evaluasi .....	17
D. Rencana Tindak Lanjut.....	17
LAMPIRAN .....	18

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelaksanaan Inovasi Kompilasi Peraturan .....	5
Gambar 2. Personalia Tim Kerja OKH .....	5
Gambar 3. Halaman Login Admin .....	8
Gambar 4. Tampilan Menu Admin .....	8
Gambar 5. Unggahan Dokumen.....	9

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Tabel Stakeholder Layanan Inovasi .....	9
--	---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kompilasi peraturan perundang-undangan adalah proses mengumpulkan dan menyusun seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dalam satu dokumen atau naskah hukum yang lengkap. Saat ini, seiring perkembangan teknologi, kompilasi peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan dalam satu web atau dokumen elektronik. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penggunaan dan pencarian dokumen peraturan yang dibutuhkan termasuk tentang Keputusan Rektor tentang Pedoman yang bersifat *regelling* (mengatur).

Kompilasi peraturan perundang-undangan sering dilakukan oleh badan atau unit yang bertanggung jawab dalam pembuatan, pengawasan, atau pelaksanaan hukum di suatu negara atau instansi tertentu. Dalam konteks UIN Maulana Malik Ibrahim adalah pada Sub Tim Kerja Organisasi dan Hukum pada Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

Proses ini melibatkan pengumpulan, pemilihan, dan penyuntingan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang telah diubah, direvisi, atau dicabut. Dalam proses kompilasi, peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan biasanya disusun berdasarkan kategori kriteria tertentu, berdasarkan hierarki perundang-undangan.

Kompilasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memudahkan akses dan pencarian dokumen peraturan oleh civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama bagi mereka yang bekerja berdasarkan regulasi atau peraturan tertentu. Dokumen atau naskah hukum yang lengkap dan mudah dipahami akan meminimalkan kesalahan prosedur dalam bekerja serta pengambilan keputusan juga menjadi tepat.

#### **B. Area Layanan Inovasi**

##### **1. Identifikasi Masalah**

Keberadaan sebuah peraturan dalam sebuah kegiatan pemerintahan penting karena menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Disamping itu peraturan juga sebagai 'warning' atau rambu-rambu agar setiap pelaksanaan kegiatan tidak melanggaran hukum.

Namun, terkadang kita merasa kesulitan dalam mencari peraturan terkait pekerjaan yang kita lakukan, atau terkadang kita memiliki peraturan tersebut namun ternyata ada peraturan yang lebih baru yang menghapus peraturan sebelumnya.

Dengan adanya inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman, diharapkan semua warga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan mudah mencari dasar hukum atas suatu permasalahan pekerjaan atau pedoman yang telah di putuskan dalam Keputusan Rektor.

## 2. Rumusan masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka bisa bisa dirumuskan terkait permasalahan inovasi yang dikerjakan:

- a. Bagaimana bentuk inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman yang akan dikembangkan?
- b. Bagaimana kontribusi inovasi kompilasi peraturan perundang-undangan dan Keputusan Rektor tentang pedoman untuk mendukung visi-misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?

## 3. Tujuan

Dari rumusan masalah tersebut, bisa dirumuskan terkait tujuan dari laporan ini:

- a. Pengembangan inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman yaitu untuk mempermudah unit kerja di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mencari peraturan terkait dengan pekerjaannya;
- b. Pengembangan inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman yaitu untuk memberikan petunjuk pelaksanaan tugas yang sesuai dengan peraturan, sehingga dapat ditetapkan standar operasional prosedur;
- c. Sebagai daya ungkit (*leverage*) untuk peningkatan layanan inovasi dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai kampus yang Unggul dan Bereputasi Internasional.

#### 4. Manfaat

Adapun manfaat praktis dari adanya inovasi tersebut bagi para stakeholder yang terlibat, antara lain:

- a. Perbaikan kinerja serta kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab masing-masing tenaga kependidikan;
- b. Terjaminnya pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur serta ketentuan dalam regulasi;
- c. Mendukung visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai kampus yang Unggul dan Bereputasi Internasional.

#### C. Ruang Lingkup

Kegiatan-kegiatan penting yang akan dilakukan dalam Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman, yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan antara lain:

1. Identifikasi masalah
2. Merumuskan alternatif solusi
3. Menentukan metodologi pencapaian output
4. Melakukan *brainstorming* dan *sharing session*
5. Merumuskan konsep kompilasi peraturan perundang-undangan dan Keputusan Rektor tentang pedoman
6. Mengaplikasikan proses kompilasi peraturan perundang-undangan dan Keputusan Rektor tentang pedoman pada semester ini.

#### D. Kriteria/ Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan inovasi layanan kompilasi peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Tersusunnya laporan berdasarkan standar laporan yang baik;
2. Tersusunnya kompilasi peraturan perundang-undangan dan SK Rektor tentang pedoman dalam satu website yang dilengkapi dengan mesin pencari.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI LAYANAN INOVASI**

#### **A. Profil Lembaga**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang yang terbit pada tanggal 21 Juni 2004. Berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2009 UIN Malang berubah menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagaimana tertuang dalam keputusan Presiden tersebut. UIN Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pengembangan keilmuan secara terintegrasi baik ilmu agama maupun ilmu umum.

Amanat kelembagaan tersebut kemudian dijelaskan dalam visi besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu "menjadi Universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keleluasaan ilmu dan kematangan profesionalitas, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat".

Dalam perjalannya, pada tim kerja Organisasi Kepegawaian dan Hukum membuat sebuah inovasi baru terhadap proses Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman.

Penerapan Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman ini juga diharapkan menjadikan sebuah langkah yang strategis untuk memudahkan pencarian dokumen hukum dan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman.

## 1. Struktur Organisasi Pelaksanaan Inovasi Kompilasi Peraturan

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelaksanaan Inovasi Kompilasi Peraturan



## 2. Personalia Tim Kerja OKH

Gambar 2. Personalia Tim Kerja OKH



### 3. Visi Tim Kerja OKH

Melaksanakan penataan organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Rektor untuk tercapainya Visi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### 4. Misi Bagian OKH

- a. Melaksanakan penyiapan penataan organisasi, tata laksana, standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal, penyiapan peraturan perundang-undangan, memberikan pertimbangan dan bantuan hukum.
- b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pegawai, penyiapan pelaksanaan seleksi, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, *assesment*, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas.

### 5. Tujuan

- a. Peningkatan pelayanan untuk mempermudah akses pencarian peraturan perundang-undangan dan Surat Keputusan Rektor tentang pedoman.
- b. Peningkatan kualitas kinerja dengan mengikuti perkembangan IT guna mempercepat pelayanan dalam bidang tata kelola pelayanan publik.

### 6. Orientasi Program Bidang Lainnya

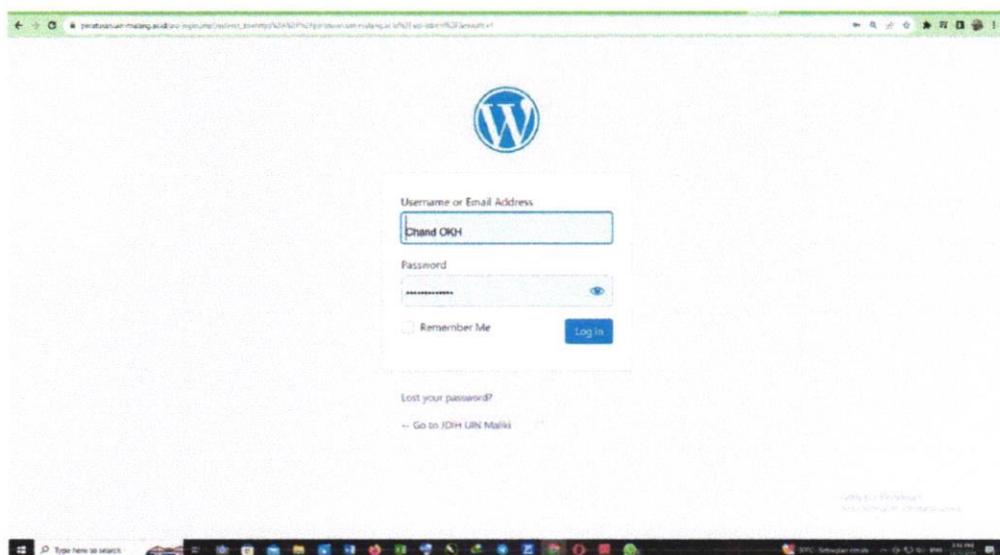
- a. Pelayanan Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman sebagai sebuah terobosan terhadap penyelesaian layanan dalam hal bidang pelayanan publik.
- b. Pelayanan Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman ditujukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian regulasi baik peraturan perundang-undangan ataupun Keputusan Rektor.

## B. Roadmap/ Milestone Layanan Inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman

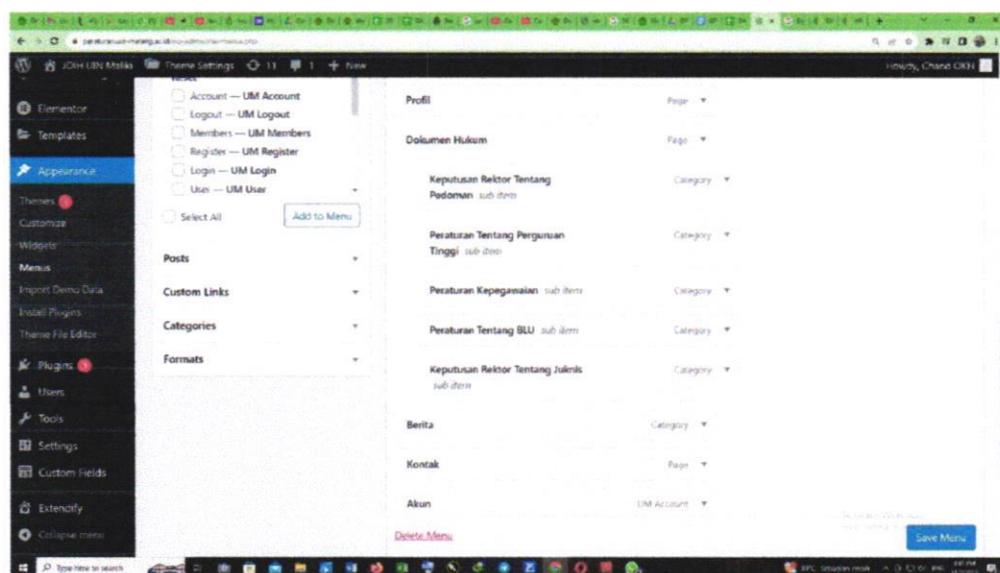
Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan pengembangan Inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman.

1. *Brainstorming* dan *sharing session* tentang pengembangan Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman mulai akhir bulan Mei sampai Juli 2023. Brainstorming dilakukan secara informal dengan bagian PTIPD serta Ketua Tim Kerja OKH. Selain dengan pihak internal, juga melakukan brainstorming dengan pengelola JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta Operator JDIH Kanwil Kumham. Hasil brainstorming tersebut dikomunikasikan dengan Ketua Tim OKH dan juga Kepala Biro AUPK.
2. Melakukan pendaftaran akun web <https://peraturan.uin-malang.ac.id/> pada Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Untuk tahap awal, telah dilakukan pendaftaran akun web ke PTIPD, melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Tim OKH, dan telah direspon dengan diberikannya akun pengelola web. Setelah mendapat akun untuk admin web, dilanjutkan langkah berikutnya yaitu membuat tampilan menu sesuai dengan kebutuhan, adapun menu yang dimaksud adalah meliputi:
  - a. Profil
  - b. Dokumen Hukum, yang terdiri dari:
    - 1) Peraturan tentang Perguruan Tinggi
    - 2) Peraturan Kepegawaian
    - 3) Peraturan tentang Badan Layanan Umum
    - 4) Keputusan Rektor tentang Pedoman
    - 5) Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis
  - c. Berita
  - d. Kontak
  - e. Pencarian Populer, yang meliputi:
    - 1) Peraturan
    - 2) Monografi
    - 3) Artikel
    - 4) Putusan

Gambar 3. Halaman Login Admin

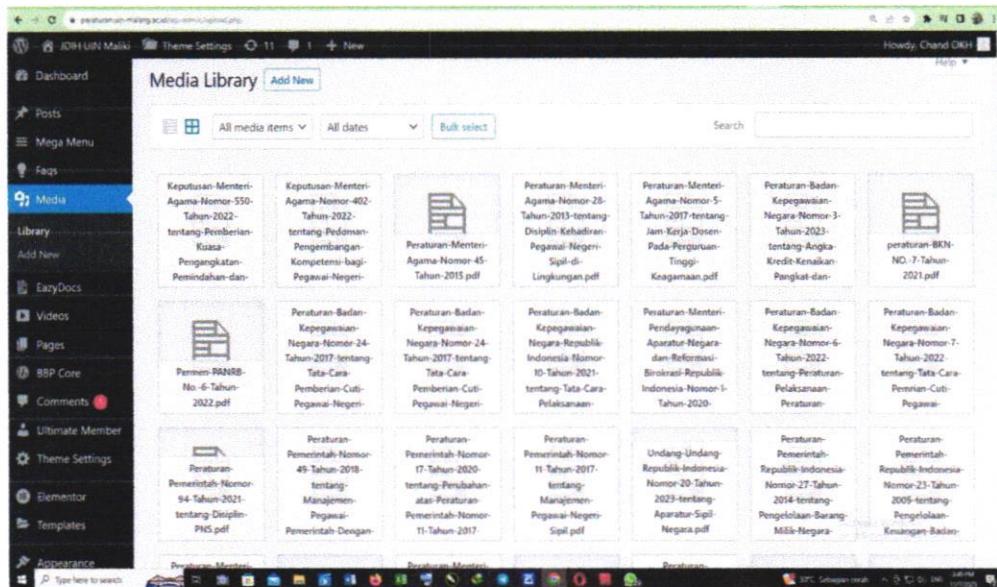


Gambar 4. Tampilan Menu Admin



### 3. Mengunggah dokumen hukum dan Keputusan Rektor

Gambar 5. Unggahan Dokumen



### C. Stakeholder Layanan Inovasi

Ada beberapa stakeholder kunci pada saat layanan inovasi ini berjalan, bisa digambarkan secara lebih mudah pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Tabel Stakeholder Layanan Inovasi

No.	Stakeholder	Peran
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan SK Gugus Inovasi</li><li>2. Menetapkan Pedoman dan/atau Kebijakan berdasarkan hasil dari Gugus Inovasi</li></ol>
2	PTIPD	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat web</li><li>2. Memastikan keamanan web</li><li>3. Menyediakan sistem dan jaringan</li><li>4. Menyediakan storage (penyimpanan data)</li></ol>
3	Tim Gugus Inovasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bekerja berdasarkan SK Rektor</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengajukan Proposal, Laporan, dan/atau Draft Pedoman/Kebijakan Rektor untuk melaksanakan hasil inovasi</li> <li>3. Mengupload hasil laporan dan/atau Pedoman/Kebijakan Rektor pada Repository</li> <li>4. Masing-masing anggota tim memasukkan hasil laporan dan/atau Pedoman/Kebijakan Rektor terkait penggunaan inovasi</li> </ol>
4	Admin web	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengunggah dokumen pada website</li> <li>2. Mengelola website</li> </ol>
5	User	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan web untuk pencarian dokumen perundang-undangan dan Keputusan Rektor</li> </ol>

#### D. Strategi Komunikasi yang Dibangun

Secara umum pada saat proses pelaksanaan inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman ini, sudah dilakukan komunikasi secara formal dan informal. Secara formal melalui forum-forum resmi seperti rapat dinas, koordinasi, maupun kegiatan resmi lainnya. Adapun pada forum tidak resmi (informal) maka pada beberapa kesempatan dilakukan *brainstorming* ke beberapa stakeholder terkait untuk memberikan masukan, kritik, dan/atau saran atas ide inovasi yang dibuat.

Pada saat inovasi ini selesai dipersiapkan, maka dilakukan sosialisasi secara umum kepada para stakeholder terkait yang akan mendapatkan dampak atas inovasi ini. terutama setelah pengembangan inovasi ini dilakukan di tingkat yang lebih luas, yaitu pada masing-masing Fakultas dan unit kerja selain Rektorat.

## BAB III

### PELAKSANAAN LAYANAN INOVASI

#### A. Capaian Layanan Inovasi

Sosialisasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman dilakukan melalui Surat Edaran Kepala Biro AUPK nomor: 6525/Un.03/B.I/ HM.00.6/11/2023, tanggal 13 November 2023 tentang pelaksanaan dan pemanfaatan inovasi Biro AUPK, juga melalui media Whatsapp Group Pimpinan. Sosialisasi ini penting dilakukan untuk memperkenalkan web tersebut kepada semua stakeholder yang berkepentingan mencari suatu peraturan perundang-undangan dan Keputusan Rektor yang dibutuhkan.

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan tentang manfaat menggunakan website <https://peraturan.uin-malang.ac.id/>, kemudian dilanjutkan dengan simulasi pencarian dokumen hukum. Dokumen yang diupload dalam website tersebut diusahakan adalah dokumen-dokumen hukum positif yang masih berlaku, karena ada peraturan yang sudah terhapus karena ada peraturan yang baru.

Ada beberapa hal yang bisa dilaporkan terkait capaian layanan inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman. Secara umum konsep atas layanan inovasi ini mendapatkan respon yang baik dari beberapa stakeholder yang diajak diskusi. Beberapa masukan dan/atau kritik atas apa yang dijadikan inovasi menjadi pertimbangan penting untuk penyempurnaan. Pada saat penyusunan inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman bisa dirumuskan serta dianalisa perbandingan pencarian dokumen hukum secara manual sebelum ada inovasi dengan pencarian dokumen hukum setelah inovasi sebagai berikut:

#### 1. Dari Sudut Pandang Akurasi Peraturan

##### **Pencarian Peraturan dengan JDIH:**

Resmi dan Terpercaya. JDIH merupakan platform resmi yang dikelola oleh lembaga pemerintah atau badan hukum yang memastikan keakuratan dan keabsahan dokumen hukum

##### **Pencarian Peraturan dengan NON-JDIH:**

Dapat Bersumber dari Berbagai Sumber. Pencarian peraturan melalui sumber non-JDIH dapat melibatkan situs web, database akademik, organisasi hukum, dan sumber-sumber lain di luar ranah pemerintah. Bisa jadi peraturan yang diperoleh dari pencarian di web pencarian adalah peraturan yang sudah tidak berlaku karena ada perubahan atau telah dihapus oleh peraturan yang lebih baru.

**Analisa:**

Website <https://peraturan.uin-malang.ac.id/> akan dikembangkan terintegrasi dengan JDIHN. Kita ketahui bahwa JDIHN saat ini menjadi rujukan pencarian peraturan yang dianggap valid dan akurat, setiap peraturan yang di upload akan ada keterangan masih berlaku atau ada perubahan atau dihapus oleh peraturan yang lebih baru. Peraturan yang terbaru akan menjadi hukum positif dan dapat dijadikan acuan untuk sebuah perbuatan hukum. Berbeda jika peraturan tersebut sudah tidak berlaku atau dirubah dengan peraturan perubahannya, maka tidak dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbuatan yang berdampak hukum

2. Dari Sudut Pandang Akses

**Pencarian Peraturan dengan JDIH:**

Menyediakan akses langsung ke dokumen-dokumen hukum resmi, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan keputusan lembaga hukum

**Pencarian Peraturan dengan NON-JDIH:**

Dokumen hukum dari sumber non-JDIH mungkin kurang terpercaya dan memerlukan validasi tambahan untuk memastikan keabsahannya

**Analisa:**

Mencari peraturan dari sumber JDIHN memudahkan seseorang yang membutuhkan suatu peraturan. Selain karena semua jenis peraturan dikompilasi dan dikelompokkan sesuai dengan tingkatan, juga memiliki tingkat validasi yang terpercaya karena yang diupload adalah peraturan-peraturan resmi yang terkoneksi dan divalidasi oleh tim yang kompeten pada instansi pemerintahan. Berbeda jika dapat peraturan dari sumber selain JDIH, maka bisa jadi peraturan tersebut tidaklah valid, mungkin karena diperoleh dari sumber yang tidak jelas, bisa jadi yang diperoleh adalah peraturan yang sudah usang.

3. Dari Sudut Pandang *Updating*

**Pencarian Peraturan dengan JDIH:**

Dokumen hukum di JDIH biasanya diperbarui secara berkala, sehingga pengguna mendapatkan akses ke versi terbaru dari peraturan hukum

**Pencarian Peraturan dengan NON-JDIH:**

Sumber non-JDIH tidak selalu memastikan pembaruan berkala dan dapat memiliki kesalahan atau kekurangan dalam ketersediaan dokumen hukum

**Analisa:**

Pencarian peraturan melalui JDIH akan lebih terjamin mendapat peraturan yang terbaru, karena jika peraturan tersebut sudah tidak berlaku atau ada perubahan, maka ada informasi bahwa peraturan tersebut telah tidak berlaku atau ada perubahan. Berbeda jika mencari peraturan melalui sumber non-JDIH, maka kita akan kesulitan mendeteksi sebuah peraturan masih berlaku, sudah ada perubahan, atau sudah dicabut.

4. Dari Sudut Pandang Fasilitas Pencarian

**Pencarian Peraturan dengan JDIH:**

JDIH menyediakan fasilitas pencarian terstruktur yang memungkinkan pengguna mencari peraturan berdasarkan kategori, tanggal terbit, dan jenis hukum

**Pencarian Peraturan dengan NON-JDIH:**

Fasilitas pencarian pada sumber non-JDIH mungkin tidak sekomprensif JDIH, sehingga pencarian dapat menjadi lebih sulit dan memakan waktu.

**Analisa:**

Pencarian peraturan dengan JDIH akan lebih mudah, karena setiap peraturan akan dikelompokkan sesuai dengan derajatnya, misal Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dll.

5. Dari sudut pandang Otoritas Hukum

**Pencarian Peraturan dengan JDIH:**

Dokumen hukum yang disediakan oleh JDIH memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan acuan dalam proses hukum

**Pencarian Peraturan dengan NON-JDIH:**

Beberapa sumber non-JDIH dapat mencakup interpretasi hukum, analisis kasus, dan artikel dari pakar hukum, memberikan konteks lebih dalam terkait dengan peraturan yang dicari

### **Analisa:**

Dalam proses hukum, maka hukum positiflah yang dipakai. Peraturan hukum yang ada di JDIH adalah peraturan yang merupakan hukum positif yang tentunya yang berlaku saat ini.

## **B. Kendala Internal dan Eksternal**

Ada beberapa potensi kendala internal dan eksternal yang berpotensi terjadi, adapun kendala internal yang terjadi adalah:

1. Pemahaman tentang perubahan sistem sehingga perlu adaptasi dari stakeholder internal (warga kampus).
2. Perlu membiasakan para pejabat untuk 'melek' IT dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
3. Butuh admin khusus yang selalu melakukan updating peraturan agar peraturan yang ada peraturan yang sudah tidak berlaku ada di beranda JDIH.
4. Butuh admin khusus yang selalu melakukan integrasi dan sinkronisasi peraturan dengan yang ada pada JDIH.

Adapun kendala eksternal yang terjadi adalah:

1. Pelaksanaan inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman ini tentunya membutuhkan perangkat teknologi dan jaringan sebagai support, jika artinya jika ada kendala pada jaringan atau perangkat teknologi, maka akan menjadi faktor penghambat.
2. Program aplikasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman yang terintegrasi dengan JDIHN ini menggunakan sistem yang dikembangkan secara nasional oleh Kementerian Hukum dan Ham pada web JDIHN, tentunya ini menjadi salah satu kendala manakala terjadi error system, atau ada ketidakvalidan data.

## **C. Strategi Mengatasi Masalah**

Dari berbagai masalah dan kendala yang ada ada beberapa hal yang dilakukan sebagai langkah mitigasi agar masalah tidak membesar dan bisa diatasi sedini mungkin. Ada beberapa hal yang dilaksanakan sebagai langkah preventif agar kendala yang ada bisa dicari solusinya, antara lain:

1. Sosialisasi dan brainstorming baik secara formal dalam forum resmi maupun informal di sela-sela pelaksanaan pekerjaan.

2. Bila diperlukan adanya pelatihan dan atau bimbingan teknis agar para admin web JDIH UIN Malang terbiasa dalam penggunaan dan proses integrasi peraturan tersebut.
3. Perlu adanya supporting penyediaan jaringan yang bagus serta perangkat teknologi yang memadai untuk pencarian peraturan.
4. Perlu dilakukan backup data secara berkala, sebagai antisipasi 'kerusakan' sistem yang berakibat pada rusaknya sistem.
5. Perlu semacam *guideline*, video tutorial, SOP, atau media yang lebih memudahkan untuk memahami pencarian peraturan melalui web kompilasi peraturan dan Keputusan Rektor ini agar para pengguna dapat mudah belajar serta mencari solusi secara mandiri jika terjadi kendala.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman merupakan sebuah bentuk inovasi serta adaptasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap perkembangan teknologi. Langkah inovatif adaptif ini bertujuan untuk menghadirkan layanan pencarian dokumen hukum atau peraturan yang lebih cepat. Layanan Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh pejabat atau pegawai yang membutuhkan sebuah peraturan. Adanya akses yang mudah tersebut diharapkan mempercepat pelayanan yang prima dalam hal pencarian peraturan perundang-undangan yang bersifat penting dan membutuhkan kecepatan. Percepatan layanan tersebut akan berpengaruh pada meningkatnya efektivitas, efisiensi serta produktivitas. Upaya inovasi dan peningkatan layanan Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman sejatinya adalah salah satu langkah menuju transformasi digital yang merupakan bagian dalam mencapai visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai lembaga pendidikan yang memiliki predikat unggul bereputasi internasional.

#### **B. Rekomendasi**

Mengacu pada hasil kajian di atas, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat mempertimbangkan beberapa hal dalam rangka meningkatkan inovasi layanan:

1. Perlu adanya peningkatan kompetensi tenaga kependidikan baik *soft skill* maupun *hard skill*. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pelayanan demi mencapai visi unggul bereputasi internasional, serta dapat memunculkan inovasi yang bermanfaat bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Inovasi terkait pelayanan perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi secara optimal. Hal ini bertujuan agar seluruh layanan beralih menjadi digital dan dapat terintegrasi dengan baik sehingga bermanfaat terhadap kelembagaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Perlu adanya Keputusan Rektor tentang pemanfaatan inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman atau inovasi-inovasi yang lain diseluruh unit kerja agar efektifitas dan efisiensi kerja dapat dilaksanakan

#### C. Evaluasi

Perubahan layanan dari pencarian peraturan melalui mesin pencari atau browser menuju kepada website pencarian <https://peraturan.uin-malang.ac.id/> yang terintegrasi dengan JDIHN tentu tidak luput dari adanya kendala. Terdapat beberapa hal yang bisa menjadi perbaikan layanan Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman:

1. Pelaksanaan Inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga masih banyak yang mencari peraturan melalui mesin pencari/browser;
2. Perlu sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar pemanfaatan inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman dapat memberikan manfaat untuk pengembangan kelembagaan.

#### D. Rencana Tindak Lanjut

1. Inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman yang berupa website <https://peraturan.uin-malang.ac.id/> kedepan akan benar-benar disesuaikan dengan template yang ada pada JDIH sehingga akan benar-benar dapat memberikan kemudahan dan manfaat yang lebih besar bagi penggunanya
2. Menyusun beberapa SOP yang terkait dengan inovasi tersebut, seperti pelaksanaan upload file peraturan di website <https://peraturan.uin-malang.ac.id/>, dapat segera dibuat dan berjalan dengan efektif serta efisien.

## LAMPIRAN



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Kampus I: Jalan Gajayana 50 Malang 651144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533  
Kampus II: Jalan Raya Ir. Soekarno No. 1, Kota Batu, Telp. (0341) 531133  
Kampus III: Jalan Locari - Tiekung, Kota Batu

Website: [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) E-mail: [info@uin-malang.ac.id](mailto:info@uin-malang.ac.id)

Nomor : 4815/Un.03/B.1.2/KP.04.1/11/2023  
Hal : Permohonan Pembuatan Website  
JDIH UIN Malang

1 September 2023

Yth.  
Kepala Pusat PTIPD  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

*Assalamualaikum wr.wb*

Dengan hormat, dalam rangka mendukung terlaksananya pelayanan yang maksimal di bidang informasi peraturan perundang-undangan dengan ini kami memohon dengan hormat agar dapat dibuatkan web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan alamat: <https://peraturan.uin-malang.ac.id/> dengan PIC web sebagai berikut:

Nama PIC : Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI  
Email : chan@uin-malang.ac.id  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda  
Demikian surat ini dibuat untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

*Wassalamualaikum wr.wb*

Ketua Kelompok Kerja  
OKH



Umihanik



Dokumen ini telah ditanda tangan secara elektronik.

Token : q7RXIz



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
BIRO ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN, DAN KEUANGAN

Nomor	: 105/Un.03/11/2023
Tanggal Pembuatan	: 14 November 2023
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
	TTD dan Cap Stempel
	Ahmad Hidayatullah
	NIP 196806222000121002

SOP PELAKSANAAN PENGUNGGAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN REKTOR

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA				
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN				
PERINGATAN		PENCATATAN/PENDATAAN				
No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Ketua Tim OKH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Pengelola Sistem Informasi	Kelengkapan	Waktu
1	Melakukan koordinasi dengan Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk menyiapkan produk hukum yang akan diunggah				Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan terbaru, Disposisi	5 menit
2	Mempersiapkan produk hukum yang akan diunggah				Disposisi	30 menit
3	Memeriksa produk-produk hukum yang akan diunggah. Jika disetujui akan didisposisikan ke Pengelola Sistem Informasi untuk diunggah. Jika tidak akan dikembalikan		Tidak		Daftar produk hukum	10 menit
4	Mengunggah produk hukum di website JDIH				Daftar produk hukum sudah disetujui	15 menit
					Produk hukum terunggah di JDIH	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
Kampus I: Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533  
Kampus II: Jalan Raya Ir. Soekarno No.1, Kota Batu, Telp. (0341) 531133  
Kampus III: Jalan Locari - Tlekung, Kota Batu  
Website: [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) E-mail: [info@uin-malang.ac.id](mailto:info@uin-malang.ac.id)

Nomor : 6525/Un.03/B.I/ HM.00.6/11/2023

13 November 2023

Hal : Surat Edaran

Yth.

1. Para Kepala Bagian
  2. Kepala Sub bagian TU Pascasarjana
  3. Para Ketua Kelompok Kerja JFT
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Menindaklanjuti pelaksanaan inovasi layanan Biro AUPK, dengan ini kami mengharap Bapak/ibu agar dapat menerapkan dan memanfaatkan beberapa layanan inovasi berikut ini:

1. Tanda Tangan Elektronik
2. Penggunaan Materai Elektronik
3. Pengajuan SK Rektor Secara Online melalui alamat web: <http://sipason.ohk.uin-malang.ac.id/>
4. Pencarian Peraturan Perundang-Undangan melalui alamat web: <https://peraturan.uin-malang.ac.id/>

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Kepala Biro AUPK,



Ahmad Hidayatullah



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : I07LB7

PROPOSAL INOVASI LAYANAN  
KOMPILASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN  
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN



Oleh

GUGUS PENGEMBANGAN INOVASI DAN MUTU KINERJA LAYANAN  
SUB BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM  
BAGIAN OKH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2023

# RANCANGAN INOVASI LAYANAN

## (SERVICE INNOVATION)

### 1. IDENTITAS INOVASI

Nama	Kompilasi Peraturan Dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman
Deskripsi	<p>Keberadaan sebuah peraturan penting karena menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Disamping itu paraturan juga sebagai 'warning' atau rambu-rambu agar setiap pelaksanaan kegiatan tidak melanggar aturan.</p> <p>Namun, terkadang kita merasa kesulitan dalam mencari peraturan terkait pekerjaan yang kita lakukan, atau terkadang kita memiliki peraturan tersebut namun ternyata ada peraturan yang lebih baru yang menghapus peraturan sebelumnya</p> <p>Dengan adanya inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman, diharapkan semua warga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan mudah mencari dasar hukum atas atau pedoman yang telah di putuskan dalam Keputusan Rektor.</p>
Pembimbing	Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd
Penanggung Jawab	Hj. Umihanik, SE., MM
Project Leader	Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI

Sumber Daya Tim	1. Meutia Balgis, S.IP	• Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan Hukum/ Analis Organisasi Perguruan Tinggi
	2. Aditya Hendrasena, SH., M.H	• Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan Hukum/ Penyusun Rancangan Perundang-undangan
	3. Arif Mahmud, S.Kom	• Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan Hukum / Pengelola Sistem Informasi

## **2. LATAR BELAKANG**

Kompilasi peraturan perundang-undangan adalah proses mengumpulkan dan menyusun seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dalam satu dokumen atau naskah hukum yang lengkap. Saat ini seiring perkembangan teknologi, kompilasi peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan dalam satu web atau dokumen elektronik. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penggunaan dan pencarian dokumen peraturan yang dibutuhkan termasuk tentang keputusan Rektor tentang Pedoman yang bersifat *regelling* (mengatur).

Kompilasi peraturan perundang-undangan sering dilakukan oleh badan atau unit yang bertanggung jawab dalam pembuatan, pengawasan, atau pelaksanaan hukum di suatu negara atau instansi tertentu. Dalam konteks UIN Maulana Malik Ibrahim adalah pada sub bagian hukum. Proses ini melibatkan pengumpulan, pemilihan, dan penyuntingan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang telah diubah, direvisi, atau dicabut. Dalam proses kompilasi, peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan biasanya disusun berdasarkan kategori kriteria tertentu, berdasarkan hierarki perundang-undangan.

Kompilasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memudahkan akses dan pencarian dokumen peraturan oleh civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama bagi mereka yang bekerja berdasarkan amanat peraturan tertentu. Dokumen atau naskah hukum yang lengkap dan mudah dipahami akan meminimalkan kesalahan prosedur dalam bekerja serta pengambilan keputusan juga menjadi tepat.

## **3. TUJUAN**

- a. Pengembangan inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman yaitu untuk mempermudah unit kerja di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mencari peraturan terkait dengan pekerjaannya;
- b. Sebagai daya ungkit (*leverage*) untuk peningkatan layanan inovasi dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai kampus yang Unggul dan Berreputasi Internasional.

## **4. MANFAAT**

Manfaat pengembangan inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman adalah dalam rangka mendukung visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai kampus yang Unggul dan Berreputasi Internasional, perbaikan kinerja serta kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab masing-masing tenaga kependidikan.

## 5. RUANG LINGKUP

Kegiatan-kegiatan penting yang akan dilakukan dalam inovasi Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman , yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan antara lain:

- a. Identifikasi masalah
- b. Merumuskan alternatif solusi
- c. Menentukan metodologi pencapaian output
- d. Melakukan benchmarking dan *sharing session*
- e. Merumuskan konsep Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Rektor Tentang Pedoman
- f. Membuat aplikasi kompilasi peraturan dan SK Rektor tentang pedoman (Oleh TIM PTIPD)
- g. Mengaplikasikan pada proses kompilasi peraturan dan SK Rektor tentang pedoman pada semester ini.

## 6. OUTPUT KUNCI

<b>Nama</b>	<b>Deskripsi</b>
a. Laporan hasil inovasi.	a. tersusunnya laporan berdasarkan standar laporan yang baik.
b. Konsep Kompilasi	b. tersusunnya kompilasi peraturan perundang-undangan dan SK Rektor tentang pedoman dalam satu website yang dilengkapi dengan mesin pencari
c. Pengembangan inovasi kompilasi peraturan	c. terwujudnya aplikasi kompilasi peraturan perundang-undangan dan SK Rektor tentang pedoman yang dapat mudah diakses dan diunduh oleh pengguna di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## 7. PENTAHAPAN UTAMA

<b>Tahap utama</b>	<b>Waktu (2023)</b>
a. <i>Benchmarking</i> dan <i>Sharing Session</i> tentang pengembangan inovasi kompilasi peraturan perundang-undangan dan SK Rektor tentang pedoman dengan tim PTIPD.	a. Awal Bulan Mei
b. Menyusun SOP dan Konsep kompilasi peraturan perundang-undangan dan SK Rektor tentang pedoman	b. Pertengahan Bulan Mei

- c. Melakukan kompilasi peraturan yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- d. Pembuatan Aplikasi Kompilasi dan input data
- e. Training aplikasi
- f. Penerapan aplikasi
- c. Akhir Bulan Mei
- d. Awal bulan Juni
- e. Pertengahan bulan Juni
- f. Akhir Bulan Juni

## 8. TIM LAYANAN INOVASI

<b>Struktur</b>	<b>Deskripsi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua tim organisasi dan Hukum</li> <li>• Tim Penyusun SOP</li> <li>• Tim IT Pengembang Aplikasi</li> <li>• Tim Review aplikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan proses bekerja berdasarkan pedoman pengkompilasian peraturan yang diterbitkan oleh Kemenkumham</li> <li>• Menyusun SOP dan pedoman Kompilasi Peraturan</li> <li>• Membuat aplikasi web kompilasi peraturan</li> <li>• Memastikan berjalannya aplikasi sesuai dengan tujuan</li> </ul>

## 9. ANGGARAN

<b>Jumlah</b>	<b>Deskripsi</b>
Tidak ada	Secara prinsip bisa dikembangkan secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada.

## 10. IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS

- a. Seluruh pimpinan unit kerja
- b. Para pejabat yang berwenang melakukan tindakan atau pengambilan keputusan berdasarkan peraturan tertentu
- c. Seluruh pegawai yang berkepentingan untuk mencari suatu dasar hukum untuk pekerjaannya

## 11. IDENTIFIKASI POTENSI MASALAH

- a. Pemahaman tentang perubahan pola kerja dan SOP sehingga perlu sosialisasi
- b. Adanya updating data yang kontinyu sehingga peraturan yang diunggah adalah yang benar-benar masih berlaku;
- c. Anggaran yang kemungkinan perlu timbul dari program ini

## 12. RESIKO

- a. Adanya potensi penyimpangan hukum, jika tidak dilakukan updating peraturan secara berkala
- b. Perlu adanya personil khusus yang faham IT dan bertanggungjawab untuk melakukan pemeliharaan website agar tidak terjadi *error system*.
- c. Adanya anggaran yang muncul sebagai akibat dari adanya aplikasi tersebut, seperti penyediaan perangkat pendukung misalnya tab, atau mini laptop agar dapat bekerja secara lebih cepat.

## 13. KRITERIA KEBERHASILAN

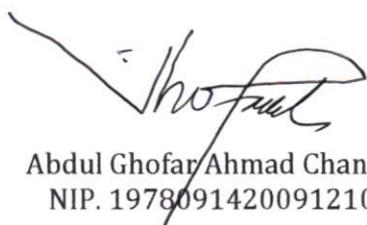
- a. Terwujudnya kompilasi peraturan perundang-undangan dan SK Rektor tentang pedoman dalam sebuah website;
- b. User merasa terlayani dan lebih mudah dalam mencari suatu peraturan;
- c. Pelaksanaan tugas yang didasarkan atas suatu peraturan berjalan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 14. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

- a. Terampilnya para pengelola website dalam melakukan pemetaan peraturan yang dibutuhkan
- b. Terampilnya para pengelola website dalam melakukan *updating* peraturan yang baru
- c. Adanya sarana prasarana pendukung
- d. Budaya kerja yang kreatif dan berorientasi pada peningkatan layanan kepuasan (*customer satisfaction*)

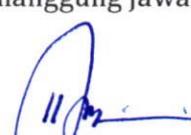
## 15. PERSETUJUAN

Ketua,



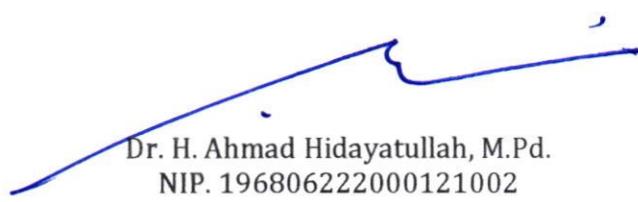
Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI  
NIP. 197809142009121004

Penanggung Jawab,



Hj. Umihanik, SE, MM  
NIP. 197108292005012003

Pembina,



Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd.  
NIP. 196806222000121002